

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,70% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,28% (yoy). Namun demikian, capaian inflasi tahunan tersebut masih lebih rendah di bawah sasaran inflasi nasional yaitu $3 \pm 1\%$. Sejalan dengan hal tersebut, laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan laporan masih lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,87% (yoy) dan inflasi kawasan Jawa yang tercatat sebesar 1,75% (yoy). Meningkatnya inflasi Jawa Tengah tersebut juga sejalan dengan tren meningkatnya tekanan harga yang berlangsung di tingkat nasional maupun di kawasan Jawa. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian mulai berangsur-angsur membaik seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat akibat pelonggaran dan penurunan level PPKM di sejumlah daerah. Perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting pada triwulan laporan seragam mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan meningkatnya permintaan dan terpengaruh dari tingginya harga komoditas global. Beberapa kebutuhan pokok yang mencatatkan kenaikan harga di atas 20% adalah minyak goreng dan cabai rawit yang masing-masing mencatatkan inflasi sebesar 31,61% (yoy) dan 20,48% (yoy). Ke depan risiko inflasi diperkirakan semakin meningkat intensitasnya. Risiko yang perlu menjadi perhatian adalah tingginya harga komoditas global (minyak dunia, CPO, jagung, dan kedelai) yang akan berdampak pada harga kebutuhan pokok dalam negeri terutama barang-barang yang memiliki kandungan impor komoditas yang cukup tinggi serta barang-barang energi. Selanjutnya rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dan perluasan objek pajaknya juga akan menjadi risiko pengendalian inflasi pada tahun mendatang.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Peningkatan inflasi di triwulan IV 2021 tersebut utamanya didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Tekanan harga pada komoditas bahan pangan utama terjadi pada komoditas hortikultura, daging dan telur ayam ras, serta minyak goreng. Beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah dan cabai rawit masih melanjutkan tren inflasi sejalan dengan menurunnya pasokan produksi di sejumlah daerah. Selanjutnya, kenaikan harga daging dan telur ayam ras didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya harga pokok produksi akibat tingginya harga pakan ternak yang sejalan dengan kenaikan harga komoditas jagung dan kedelai dunia. Selanjutnya, naiknya tekanan inflasi juga berasal dari komoditas minyak goreng akibat kelangkaan dan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global yang terjadi selama kuartal IV 2021. Selain itu, tekanan harga pada komoditas rokok kretek filter menjelang akhir tahun juga terjadi seiring dengan langkah antisipasi industri rokok sehubungan dengan adanya penetapan tarif cukai rokok tahun 2022 sebesar 25%. Seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan IV 2021 mencatatkan kenaikan inflasi tahunan dibandingkan triwulan lalu. Kenaikan inflasi tahunan yang paling tinggi terjadi di Kota Surakarta, disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Angka tersebut kemudian disusul oleh Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kabupaten Kudus, dan Kota Tegal. Sementara itu, Kota Semarang mencatatkan inflasi terendah pada periode ini.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi

Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pada Oktober 2021, yaitu: • Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID Semetser II 2021 □ Pada rapat ini dibahas sinergi dalam rangka pengendalian inflasi pangan di Jawa Tengah. Beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti, antara lain: pemetaan tata niaga pangan di Jawa Tengah, adanya upaya bersama untuk memperbaiki tata niaga pangan di Jawa Tengah untuk menjamin kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. 2. Kegiatan TPID Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada November dan Desember 2021, yaitu: • Koordinasi tindak lanjut High Level Meeting TPID yang berlangsung pada 25 November 2021, bersama jajaran anggota TPID Provinsi Jawa Tengah yang membahas perkembangan harga volatile food dan rantai perdagangan beberapa komoditas strategis seperti beras dan jagung serta solusi efektivitas rantai pasok bahan pangan di Jawa Tengah. • Koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perum Bulog, terkait rencana operasi pasar untuk komoditas beras, sejalan dengan program nasional, Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). • Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dan OPD se-Jawa Tengah membahas upaya stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN dan tahun baru 2022. • Peresmian pembentukan tambahan 10 BUMP pangan di Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo pada Bulan Desember 2021

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejauh ini implementasi kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin pada Inflasi tahunan pada triwulan laporan terpantau sebesar 1,70% (yoy), atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2021 yang tercatat sebesar 1,28% (yoy). Realisasi tersebut memang tidak lebih baik dibandingkan kenaikan inflasi nasional dari 1,60% (yoy) menjadi sebesar 1,87% (yoy). Namun demikian, Koordinasi yang intensif antar anggota TPID dapat menahan laju inflasi ke level yang lebih tinggi lagi. Rapat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan jagung dapat menahan kenaikan harga pakan ke level yang lebih tinggi dan berimplikasi pada terkendalinya kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam ras. Dalam jangka panjang peresmian 10 BUMP baru di Jawa Tengah akan berdampak positif bagi penguatan kelembagaan petani di kemudian hari.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil sebagai upaya pengendalian inflasi Jawa Tengah ke depan, diantaranya: a Berperan aktif dalam memantau ketersediaan dan kelancaran distribusi produk-produk kebutuhan pokok masyarakat, karena pada tahun 2022 tendensi risiko inflasi akan semakin meningkat baik dari faktor eksternal maupun domestik b Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengkinian dashboard pemantauan harga dan pasokan menggunakan sistem informasi Sihati dan Sislogda. c Menjalankan strategi komunikasi efektif melalui omni chanel untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap berbagai risiko inflasi yang berpotensi akan muncul di tahun 2022 d Percepatan penguatan bisnis proses 10 BUMP yang baru dibentuk melalui kerjasama kelembagaan antar BUMP dan pihak swasta.